



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tahun 2019



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Pagu Indikatif dan sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019. Disamping menyajikan data perencanaan Renja juga menyajikan kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Kuala Tungkal, 2018

Kepala BPKAD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. RAJIUN SITOANG, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19611120 199203 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4 . Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	16
2.4 . Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	25
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	31
BAB V PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menguraikan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/SKPD kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat pentingnya arti dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berikutnya.
2. Program dan kegiatan dalam renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Reppublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, antara lain :

1. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan, tujuannya adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD/OPD dengan Renja K/L dan Renja Pro/Kab/Kota dari tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta sistem garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan tahun berjalan (tahun n-1).

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Kajian terhadap capaian pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan mursreimbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumus isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran. BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah juga adalah salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pendukung penyelenggaraan mendukung pelaksanaan dari Misi ke 4 (empat) Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu “Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik” yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2017

NAMA OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN
					TARGET RENJA TAHUN 2017	REALISASI RENJA TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2018)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.123.121.890	33.737.550	1.196.527.334	1.118.515.125	93,48	1.123.121.890	2.275.374.565	202,59	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.295.000	-	2.295.000	2.193.000	95,56	2.295.000	4.488.000	195,56	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	-	600.000.000	594.000.000	99,00	600.000.000	1.194.000.000	199,00	
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	228.520.000	-	268.520.000	249.270.000	92,83	228.520.000	477.790.000	209,08	
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.413.190	-	4.979.634	2.913.000	58,50	3.413.190	6.326.190	185,35	
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	185.690.550	33.737.550	214.559.550	197.592.525	92,09	185.690.550	417.020.625	224,58	
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.220.000	-	12.010.000	11.755.000	97,88	14.220.000	25.975.000	182,67	
	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.483.150	-	5.463.150	3.921.950	71,79	3.483.150	7.405.100	212,60	
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	19.500.000	-	49.500.000	29.710.000	60,02	19.500.000	49.210.000	252,36	
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	66.000.000	-	39.200.000	27.159.650	69,28	66.000.000	93.159.650	141,15	
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	956.000.000	-	202.450.000	170.069.128	84,01	956.000.000	1.126.069.128	117,79	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		148.500.000	-	377.350.000	309.089.577	81,91	148.500.000	457.589.577	308,14	
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	360.750.000	-	-	-	-	360.750.000		
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	28.000.000	-	224.100.000	215.017.000	95,95	28.000.000	243.017.000	867,92	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 403 Tabel T-C.29.

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	98.500.000	-	116.050.000	66.987.996	57,72	98.500.000	165.487.996	168,01	
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi baik	22.000.000	-	37.200.000	27.084.581	72,81	22.000.000	49.084.581	223,11	
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		33.375.000	-	62.175.000	53.505.000	86,06	33.375.000	86.880.000	260,31	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	33.375.000	-	62.175.000	53.505.000	86,06	33.375.000	86.880.000	260,31	
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000.000	-	20.000.000	9.000.000	45,00	50.000.000	59.000.000	118,00	
05	Pengembangan SDM	Terlaksananya Pengembangan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur PNS	50.000.000	-	20.000.000	9.000.000	45,00	50.000.000	59.000.000	118,00	
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		69.000.000	-	103.500.000	95.362.500	92,14	69.000.000	164.362.500	238,21	
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	69.000.000	-	69.000.000	62.662.500	90,82	69.000.000	131.662.500	190,82	
021	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas	Tersusunnya Renja	78.100.000		34.500.000	32.700.000	94,78	78.100.000	110.800.000	141,87	
33	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		9.770.484.050	5.526.767.769	10.095.905.050	7.981.930.384	79,06	9.770.484.050	23.279.182.203	238,26	
001	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja	59.070.000	-	79.805.000	53.240.000	66,71	59.070.000	112.310.000	190,13	
002	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Satuan Harga	57.400.000	110.965.000	41.900.000	38.390.000	91,62	57.400.000	206.755.000	360,20	
006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah	1.714.550.000	507.598.700	1.724.550.000	1.260.676.950	73,10	1.714.550.000	3.482.825.650	203,13	
007	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	404.050.000	236.164.300	415.275.000	365.664.100	88,05	404.050.000	1.005.878.400	248,95	
008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	293.400.000	556.889.250	293.400.000	228.174.000	77,77	293.400.000	1.078.463.250	367,57	
009	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	274.000.000	261.933.000	250.235.400	214.481.370	85,71	274.000.000	750.414.370	273,87	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 403 Tabel T-C.29.

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
016	Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Aset/Barang Daerah	341.070.000	-	295.370.000	197.386.750	66,83	341.070.000	538.456.750	157,87	
021	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Buku Inventaris SKPD dan Kabupaten	273.964.000	-	213.964.000	151.032.475	70,59	273.964.000	424.996.475	155,13	
028	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengendalian Kas	150.675.000	216.220.100	150.675.000	137.767.610	91,43	150.675.000	504.662.710	334,93	
030	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah	Efisiensi Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	292.605.000	739.000.000	292.605.000	268.940.000	91,91	292.605.000	1.300.545.000	444,47	
034	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Daftar Barang Milik Daerah	103.800.000	-	70.800.000	51.163.850	72,27	103.800.000	154.963.850	149,29	
035	Penyusunan Pelaporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Laporan Realisasi Anggaran Dana TP dan UB	119.200.000	116.403.000	119.200.000	27.145.000	22,77	119.200.000	262.748.000	220,43	
036	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Pemberian Belanja Tidak Langsung PPKD	184.719.750	113.249.300	184.719.750	136.737.935	74,02	184.719.750	434.706.985	235,33	
043	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Tercapainya Informasi tentang Pedoman Penyusunan APBD	46.842.550	-	46.842.550	25.618.650	54,69	46.842.550	72.461.200	154,69	
045	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	121.700.000	125.701.600	121.700.000	92.438.830	75,96	121.700.000	339.840.430	279,24	
046	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	217.400.000	264.005.490	217.400.000	137.589.750	63,29	217.400.000	618.995.240	284,73	
048	Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah	Informasi dan Data Transaksi Keuangan Daerah	111.800.000	98.081.566	111.800.000	103.716.480	92,77	111.800.000	313.598.046	280,50	
050	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	Tersedianya SPD seluruh SKPD	126.310.000	113.080.200	107.310.000	101.784.100	94,85	126.310.000	341.174.300	270,11	
051	Penatausahaan dan Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Daerah	Dokumen Keuangan Daerah Tersiapkan secara Elektronik	180.200.000	-	55.200.000	53.450.000	96,83	180.200.000	233.650.000	129,66	
053	Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	- Jaringan Komunikasi Keuangan Menjadi Lancar - Termonitornya Jaringan yang Terkoneksi - Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Jaringan di SKPD	147.876.000	-	147.876.000	90.259.814	61,04	147.876.000	238.135.814	161,04	
056	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	Terciptanya Informasi Keuangan Daerah berupa Daftar Gaji/ Pemeliharaan Simda Gaji dan TKD	254.261.750	313.001.300	274.261.750	237.405.410	86,56	254.261.750	804.668.460	316,47	
057	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Terciptanya Pelayanan Penatausahaan Keuangan	2.148.700.000	1.157.820.000	2.148.700.000	1.724.251.064	80,25	2.148.700.000	5.030.771.064	234,13	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 403 Tabel T-C.29.

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
058	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	Terciptanya Informasi Keuangan Daerah	153.550.000	-	173.550.000	152.261.728	87,73	153.550.000	305.811.728	199,16	
059	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlatihnya Keuangan Unit Kerja Daerah	98.185.000	-	98.185.000	70.111.387	71,41	98.185.000	168.296.387	171,41	
060	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah	145.950.000	-	105.900.000	98.256.047	92,78	145.950.000	244.206.047	167,32	
061	Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	Terciptanya Pengelolaan Keuangan yang maksimal	111.300.000	-	134.300.000	127.410.310	94,87	111.300.000	238.710.310	214,47	
062	Pelaksana Pelaporan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah	Terlaksananya Sistem Akuntansi Pemerintah	132.550.000	139.172.850	132.550.000	106.155.895	80,09	132.550.000	377.878.745	285,08	
064	Penatausahaan Penerimaan	Terlaksananya Penatausahaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	88.250.000	-	88.250.000	67.702.415	76,72	88.250.000	155.952.415	176,72	
065	Penatausahaan Belanja	Terlaksananya Penatausahaan Belanja yang Efisien	87.500.000	-	87.500.000	67.270.000	76,88	87.500.000	154.770.000	176,88	
066	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	244.450.000	95.568.000	194.450.000	143.156.300	73,62	244.450.000	483.174.300	197,66	
067	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	335.750.000	361.914.113	1.035.606.000	877.909.500	84,77	335.750.000	1.575.573.613	469,27	
068	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	106.350.000	-	106.350.000	90.804.600	85,38	106.350.000	197.154.600	185,38	
069	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	136.300.000	-	119.300.000	100.367.042	84,13	136.300.000	236.667.042	173,64	
070	Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	Terciptanya Pengeluaran Belanja Langsung yang efektif dan efisien	142.700.000	-	142.700.000	95.005.137	66,58	142.700.000	237.705.137	166,58	
071	Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjab Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	Terkendalinya Anggaran Kas dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	137.875.000	-	97.675.000	92.652.500	94,86	137.875.000	230.527.500	167,20	
075	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	104.300.000	-	94.119.600	83.794.600	89,03	104.300.000	188.094.600	180,34	
076	Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	Terlaksananya Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya bagi PNS Kab. Tanjab Barat	121.880.000	-	121.880.000	111.758.785	91,70	121.880.000	233.638.785	191,70	
Jumlah			11.194.480.940	5.560.505.319	11.855.457.384	9.567.402.586	80,70	11.194.480.940	26.322.388.845	235,14	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 403 Tabel T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sehingga analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah											
	- Penyusunan Analisa Standar Belanja		Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD		Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD		Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD		Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD		Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD		Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)		Tersedianya SPD seluruh Perangkat Daerah	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	
	- Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjab Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD		Tersusunnya Anggaran Kas dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	
	- Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung		Kelancaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	
	- Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan		Kelancaran Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya bagi PNS	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	
	- Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD		Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial		Terlaksananya Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya		Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah		Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah		Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK		Terlaksananya Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah		Terlaksananya Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah		Terciptanya Laporan Arus Kas yang transparan dan akuntabel	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	- Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah		Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 404 Tabel T-C.30.

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama		Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran Dana TP dan UB	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	
	- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran		Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah		Informasi dan Data Transaksi Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	
	- Penatausahaan dan Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Daerah		Dokumen Keuangan Daerah Terarsipkan secara Elektronik	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	-	
	- Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah		Kelancaran Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Terlatihnya SDM Keuangan Unit Kerja	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Pelaksana Pelaporan Akuntansi Pendapatan dan Belanja		Terlaksananya Sistem Akuntansi Pemerintah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	
	- Penatausahaan Penerimaan		Terekonsiliasinya data penerimaan di SKPD	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	- Penatausahaan Belanja		Terekonsiliasinya data belanja di SKPD	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	- Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengelolaan BMD terlaksana sesuai ketentuan	12 Bulan				12 Bulan				
	- Penyusunan Standar Satuan Harga		Buku Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Inventarisasi Barang Milik Daerah		Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang akurat	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
	- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Tersedianya Laporan Daftar Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
	- Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 404 Tabel T-C.30.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian yang signifikan bagi SKPD dimana dengan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD diantaranya :

1. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan dan asset terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan asset belum memadai.
2. Penguasaan SDM pengelola keuangan terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset masih kurang memadai.
3. Belum optimalnya penggunaan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa dan belum diterapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran.
4. Belum adanya hasil evaluasi indikator kinerja sebagai input perencanaan penganggaran tahun berikutnya.
5. Dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.
6. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan IV.
7. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di masing-masing SKPD masih rendah.
8. Verifikator SKPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
9. Belum adanya Data Barang Milik Daerah yang akurat sebagai dasar penyusunan Aset Tetap pada Neraca.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diketahui dengan melakukan analisa swot, Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan/potensi (*Strength*)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.

- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan (*Weaknes*)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6) Belum Optimanya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh SKPD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah semakin ketat dan meningkat intensitasnya

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar (Rata – rata)		2.463.938.585	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar (Rata – rata)		1.948.523.550	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	2.295.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	2.295.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	12 Bulan	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	12 Bulan	-	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	BPKAD	Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12 Bulan	109.620.000	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	BPKAD	Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12 Bulan	61.320.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPKAD	Kelancaran Administrasi Keuangan	12 Bulan	420.510.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPKAD	Kelancaran Administrasi Keuangan	12 Bulan	420.510.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKAD	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	3.413.190	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKAD	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	3.413.190	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	198.812.892	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	198.812.857	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	14.220.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	14.220.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.952.503	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.952.503	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BPKAD	Tersedianya Bahan Bacaan/ Koran	12 Bulan	21.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BPKAD	Tersedianya Bahan Bacaan/ Koran	12 Bulan	21.000.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKAD	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	72.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKAD	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	72.000.000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Terlaksananya perjalanan dinas secara efektif dan efisien	12 Bulan	1.017.115.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Terlaksananya perjalanan dinas secara efektif dan efisien	12 Bulan	1.150.000.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat daerah		285.540.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat daerah		321.100.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Terpenuhinya Perlengkapan Untuk Gedung Kantor	1 Kegiatan	18.400.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Terpenuhinya Perlengkapan Untuk Gedung Kantor	1 Kegiatan	18.400.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Terpenuhinya Peralatan Untuk Gedung Kantor	1 Kegiatan	91.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Terpenuhinya Peralatan Untuk Gedung Kantor	1 Kegiatan	124.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	BPKAD	Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	12 Bulan	145.140.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	BPKAD	Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	12 Bulan	147.700.000	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 405 Tabel T-C.31.

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi baik	12 Bulan	31.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi baik	12 Bulan	31.000.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur		52.680.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur		87.100.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKAD	Tersedianya pembiayaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada BPKAD	2 Paket	52.680.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKAD	Tersedianya pembiayaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada BPKAD	2 Paket	87.100.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kompetensi ASN		50.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kompetensi ASN		50.000.000	
	Pengembangan SDM	BPKAD	Terlaksananya Pengembangan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur PNS	1 Paket	50.000.000	Pengembangan SDM	BPKAD	Terlaksananya Pengembangan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur PNS	1 Paket	50.000.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"		61.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"		61.000.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BPKAD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Dokumen	61.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BPKAD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Dokumen	61.000.000	
6	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	8.280.904.935	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD		6.275.004.251	
			Kelancaran Pelayanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	12 Bulan				Kelancaran Pelayanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung			
			Tersusunnya Laporan Keuangan yang Berkualitas dan Tepat Waktu	1 Dokumen				Tersusunnya Laporan Keuangan yang Berkualitas dan Tepat Waktu			
			Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat	1 Dokumen				Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat			
	Penyusunan dan Revisi Analisa Standar Belanja	BPKAD	Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja	1 Dokumen	63.100.000	Penyusunan dan Revisi Analisa Standar Belanja	BPKAD	Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja	1 Dokumen	40.450.000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Dokumen	1.543.390.343	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Dokumen	1.545.790.250	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	326.224.500	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	323.269.500	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	235.436.250	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	235.436.250	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 405 Tabel T-C.31.

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	219.757.125	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	219.757.125	
	Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	- Tersusunnya Dokumen KUA Tahun 2020 - Tersusunnya Dokumen PPAS Tahun 2020	4 Dokumen	187.250.000	Penyusunan KUA dan PPAS					
	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	BPKAD	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	1 Kegiatan	35.008.176	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	BPKAD	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	1 Kegiatan	35.008.176	
	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	BPKAD	Tersedianya SPD seluruh Perangkat Daerah	5 Dokumen/ SKPD	97.810.125	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	BPKAD	Tersedianya SPD seluruh Perangkat Daerah	5 Dokumen/ SKPD	97.810.000	
	Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjab Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	BPKAD	Tersusunnya Anggaran Kas dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	5 Dokumen/ SKPD	98.392.875	Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjab Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	BPKAD	Tersusunnya Anggaran Kas dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	5 Dokumen/ SKPD	98.392.750	
	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	BPKAD	Kelancaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	1 Tahun Anggaran	89.381.250	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	BPKAD	Kelancaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	1 Tahun Anggaran	89.381.250	
	Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	BPKAD	Kelancaran Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya bagi PNS Kab. Tanjab Barat	1 Tahun Anggaran	90.385.050	Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	BPKAD	Kelancaran Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya bagi PNS Kab.	1 Tahun Anggaran	90.385.000	
	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	BPKAD	Terciptanya Laporan Arus Kas yang transparan dan akuntabel	12 Bulan	126.393.750	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	BPKAD	Terciptanya Laporan Arus Kas yang transparan dan akuntabel	12 Bulan	130.787.500	
	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD sesuai ketentuan	12 Bulan	141.728.738	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD sesuai ketentuan	12 Bulan	136.200.000	
	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	12 Bulan	278.492.529	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	12 Bulan	234.050.000	
	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset daerah	12 Bulan	2.041.255.500	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset daerah	12 Bulan	648.200.000	
	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	150.412.500	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	149.954.450	
	Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	12 Bulan	119.188.125	Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	12 Bulan	143.800.000	
	Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	12 Bulan	137.812.500	Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	12 Bulan	143.150.000	
	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional	BPKAD	Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	162.225.000	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional	BPKAD	Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	152.335.000	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 405 Tabel T-C.31.

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	BPKAD	Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen	90.216.000	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	BPKAD	Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen	85.455.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPKAD	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	1 Dokumen	234.795.750	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPKAD	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	1 Dokumen	172.675.000	
	Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	BPKAD	Kelancaran Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	12 Bulan	120.725.850	Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	BPKAD	Kelancaran Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	12 Bulan	132.725.850	
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Terlatihnya SDM Keuangan Unit Kerja	1 Kegiatan	273.336.000	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Terlatihnya SDM Keuangan Unit Kerja	1 Kegiatan	142.117.000	
	Penatausahaan Penerimaan	BPKAD	Terekonsiliasinya data penerimaan di SKPD	12 Laporan	80.325.000	Penatausahaan Penerimaan	BPKAD	Terekonsiliasinya data penerimaan di SKPD	12 Laporan	72.670.000	
	Penatausahaan Belanja	BPKAD	Terekonsiliasinya data belanja di SKPD	12 Laporan	79.222.500	Penatausahaan Belanja	BPKAD	Terekonsiliasinya data belanja di SKPD	12 Laporan	76.170.000	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	BPKAD	Buku Standar Satuan Harga	1 Dokumen	130.650.000	Penyusunan Standar Satuan Harga	BPKAD	Buku Standar Satuan Harga	1 Dokumen	67.550.000	
	Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	12 Bulan	198.135.000	Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	12 Bulan	180.650.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Tersedianya Laporan Daftar Barang Milik Daerah	4 Buku	105.862.500	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Tersedianya Laporan Daftar Barang Milik Daerah	4 Buku	100.350.000	
	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	191.730.000	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	180.934.150	
	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	346.500.000	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	335.550.000	
	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BPKAD	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	44 OPD	108.487.000	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BPKAD	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	44 OPD	67.650.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan	2 Laporan	98.975.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan	2 Laporan	68.150.000	
	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Badan	BPKAD	Tersusunnya Renja BPKAD	4 Dokumen	78.300.000	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Badan	BPKAD	Tersusunnya Renja BPKAD	4 Dokumen	78.200.000	
					11.194.063.520					8.742.727.801	

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal 405 Tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 68 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2017 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, adapun usulan program tersebut yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN (2015-2019) Bab 6 yaitu Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional yang digariskan dalam RPJMN ini dilaksanakan melalui upaya seluruh komponen bangsa, yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan

Dalam pelaksanaan RPJMN yang dikenal sebagai Program Nawa Cita (Agenda Prioritas), Program Nawa Cita merupakan Program Nasional yang membuat Visi dan Misi Bangsa yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***.

Untuk melaksanakan visi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangan dengan tetap menjamin kestabilan ekonomi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan mensinergikan penjabaran kebijakan program daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan program nawa cita.

Pada Bab 6 salah satu agenda pembangunan nasional yaitu membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda prioritas sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;
3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

Dari kelima sub agenda prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada sub agenda prioritas RPJMN yaitu ***“Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”***.

Bagian dari sub agenda prioritas pembangunan nasional tersebut adalah visi BPKAD Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu ***“Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis dan Akuntabel”***

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah demi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan sedangkan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel. Adapun tujuan, sasaran, indikator dan target OPD selama 5 Tahun ditunjukkan pada tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD,

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

7. Program pelayanan administrasi perkantoran;
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
10. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2019, dapat diuraikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

TABEL 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar (Rata – rata)			1.815.638.585			2.526.622.064
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	BPKAD	12 Bulan	2.295.000	APBD	12 Bulan	2.409.750
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	BPKAD	12 Bulan	-	APBD	12 Bulan	600.000.000
04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	BPKAD	12 Bulan	61.320.000	APBD	12 Bulan	115.101.000
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kelancaran Administrasi Keuangan	BPKAD	12 Bulan	420.510.000	APBD	12 Bulan	441.535.500
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	BPKAD	12 Bulan	3.413.190	APBD	12 Bulan	3.583.850
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BPKAD	12 Bulan	198.812.892	APBD	12 Bulan	208.753.537
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	12 Bulan	14.220.000	APBD	12 Bulan	14.931.000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	12 Bulan	4.952.503	APBD	12 Bulan	5.200.128
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/ Koran	BPKAD	12 Bulan	21.000.000	APBD	12 Bulan	22.050.000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	BPKAD	12 Bulan	72.000.000	APBD	12 Bulan	75.600.000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas secara efektif dan efisien	BPKAD	12 Bulan	1.017.115.000	APBD	12 Bulan	1.037.457.300
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat daerah			313.100.000			301.657.000
09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Untuk Gedung Kantor	BPKAD	1 Kegiatan	18.400.000	APBD	1 Kegiatan	21.160.000
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Untuk Gedung Kantor	BPKAD	1 Kegiatan	117.000.000	APBD	1 Kegiatan	95.550.000
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	BPKAD	12 Bulan	146.700.000	APBD	12 Bulan	152.397.000
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi baik	BPKAD	12 Bulan	31.000.000	APBD	12 Bulan	32.550.000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			87.100.000			55.314.000
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pembiayaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada BPKAD	BPKAD	2 Paket	87.100.000	APBD	2 Kegiatan	55.314.000
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi ASN			50.000.000			52.500.000
	05 Pengembangan SDM	Terlaksananya Pengembangan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur PNS	BPKAD	1 Paket	50.000.000	APBD	1 Kegiatan	52.500.000
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"			61.000.000			64.050.000
	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	BPKAD	3 Dokumen	61.000.000	APBD	3 Dokumen	64.050.000
33	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Bidang Anggaran	Tepat Waktu	8.079.166.494		Tepat Waktu	8.461.924.521
		Kelancaran Pelayanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	Bidang Perbendaharaan	12 Bulan			12 Bulan	
		Tersusunnya Laporan Keuangan yang Berkualitas dan Tepat Waktu	Bidang Akuntansi	1 Dokumen			1 Dokumen	
		Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat	Bidang Aset	1 Dokumen			1 Dokumen	
33	01 Penyusunan dan Revisi Analisa Standar Belanja	Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja	BPKAD	1 Dokumen	63.100.000	APBD	1 Dokumen	65.400.000
33	04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKAD	1 Dokumen	1.543.390.343	APBD	1 Dokumen	1.558.824.246
33	05 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	BPKAD	1 Dokumen	326.224.500	APBD	1 Dokumen	342.535.725
33	06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	1 Dokumen	235.436.250	APBD	1 Dokumen	247.208.063
33	07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	1 Dokumen	219.757.125	APBD	1 Dokumen	230.744.981
33	20 Penyusunan KUA dan PPAS	- Tersusunnya Dokumen KUA Tahun 2020 - Tersusunnya Dokumen PPAS Tahun 2020 - Tersusunnya Dokumen KUA Perubahan Tahun 2019 - Tersusunnya Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2019	BPKAD		-	APBD		-

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2020		
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33	26	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	BPKAD	1 Kegiatan	35.008.176	APBD	1 Kegiatan	36.758.585
33	29	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	Tersedianya SPD seluruh Perangkat Daerah	BPKAD	5 Dokumen/SKPD	97.810.000	APBD	5 Dokumen/SKPD	102.700.631
33	44	Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjab Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	Tersusunnya Anggaran Kas dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	BPKAD	5 Dokumen/SKPD	98.392.750	APBD	5 Dokumen/SKPD	103.312.519
33	45	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	Kelancaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	BPKAD	1 Tahun Anggaran	89.381.250	APBD	1 Tahun Anggaran	93.850.313
33	46	Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	Kelancaran Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya bagi PNS Kab. Tanjab Barat	BPKAD	1 Tahun Anggaran	90.385.000	APBD	1 Tahun Anggaran	94.904.303
33	21	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	Terciptanya Laporan Arus Kas yang transparan dan akuntabel	BPKAD	12 Bulan	137.793.750	APBD	12 Laporan	132.713.438
33	25	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD sesuai ketentuan	BPKAD	12 Bulan	136.119.750	APBD	12 Bulan	148.815.174
33	31	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	BPKAD	12 Bulan	249.950.000	APBD	12 Bulan	292.417.155
33	32	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset daerah	BPKAD	12 Bulan	2.033.600.000	APBD	12 Bulan	2.051.461.778
33	33	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah sesuai ketentuan	BPKAD	12 Bulan	154.150.000	APBD	12 Bulan	157.933.125
33	36	Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	Terlaksananya Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	BPKAD	12 Bulan	134.100.000	APBD	12 Bulan	125.147.531
33	43	Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	BPKAD	12 Bulan	141.700.000	APBD	12 Bulan	144.703.125
33	23	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	12 Bulan	154.500.000	APBD	Terlaksana	170.336.250

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2020		
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33	27	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	BPKAD	12 Dokumen	90.216.000	APBD	12 Dokumen	94.726.800
33	28	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	BPKAD	1 Dokumen	234.795.750	APBD	1 Dokumen	246.535.538
33	30	Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	Kelancaran Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	BPKAD	12 Bulan	120.725.850	APBD	12 Bulan	126.762.143
33	34	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlatihnya SDM Keuangan Unit Kerja	BPKAD	1 Kegiatan	273.336.000	APBD	1 Kegiatan	287.002.800
33	37	Penatausahaan Penerimaan	Terekonsiliasinya data penerimaan di SKPD	BPKAD	12 Laporan	80.485.000	APBD	12 Laporan	84.341.250
33	38	Penatausahaan Belanja	Terekonsiliasinya data belanja di SKPD	BPKAD	12 Laporan	79.284.500	APBD	12 Laporan	83.183.625
33	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Satuan Harga	BPKAD	1 Dokumen	130.650.000	APBD	1 Dokumen	150.247.500
33	10	Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	12 Bulan	199.120.000	APBD	12 Bulan	227.855.250
33	24	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Daftar Barang Milik Daerah	BPKAD	4 Buku	105.862.500	APBD	3 Laporan	121.741.875
33	39	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	BPKAD	12 Bulan	191.730.000	APBD	12 Bulan	220.489.500
33	40	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BPKAD	12 Bulan	346.500.000	APBD	12 Bulan	398.475.000
33	41	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	BPKAD	44 OPD	108.487.000	APBD	12 Bulan	124.760.050
33	42	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan	BPKAD	2 Laporan	98.875.000	APBD	2 Dokumen	113.821.250
33	69	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Badan	Tersusunnya Renja BPKAD	BPKAD	4 Dokumen	78.300.000	APBD	1 Dokumen	82.215.000
						10.406.005.079			11.462.067.585

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

RENJA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021. RENJA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 juga merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang berjumlah Rp11.194.063.520.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2019, dimana RENJA Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2019.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Renja Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Renja yang telah diuraikan diatas maka ada catatan penting yang perlu diperhatikan.

- Bahwa pelaksanaan dan realisasi dari Renja BPKAD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 telah di realisasikan dengan baik.
- Optimalisasi kinerja semua bidang (pegawai) merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan dalam tupoksi di BPKAD.
- Rencana tindak lanjut dari program BPKAD tetap mengedepankan bekerja dengan baik dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel.